

DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA PEMBEBASAN WNI SANDERA ABU SAYYAF GROUP TAHUN 2016

Dian Gratia Christy, Dra. Christy Damayanti, M.Si, Dra. Herning Suryo Sardjono, M.Si

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Artikel penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam membebaskan WNI sandera *Abu Sayyaf Group* pada tahun 2016. Aksi teror yang dilakukan *Abu Sayyaf Group* dengan melakukan penculikan, penyanderaan dan pembunuhan yang bertujuan mendapatkan uang tebusan untuk mendanai persenjataan dan kegiatan teror dan bertujuan membentuk kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara. Peneliti menggunakan pendekatan diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral sebagai teori. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian berbasis proses wawancara dan pengumpulan dokumen melalui penjabaran secara deskriptif. Dari penelitian dari diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya membebaskan WNI sandera *Abu Sayyaf Group*. Peneliti menemukan bahwa dengan dilaksanakan diplomasi bilateral yang efektif dengan terlibatnya pemerintah Indonesia – Filipina melalui KBRI Manila dan KJRI Davao terlibat dalam proses negosiasi yang diimplementasikan dalam kerjasama Patroli terkoordinasi (PHILINDO MC) dan dibukanya askes pendidikan Muslim Indonesia – Filipina. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Kota Kinabalu – dan Malaysia menghasilkan pendekatan dengan tokoh – tokoh komunitas Filipina di Sabah, dengan memberikan akses dan informasi. Diplomasi yang dilakukan Kemlu melalui dan berbagai jajaran Kementerian dan diplomasi multilateral. Pemerintah Indonesia dapat membebaskan WNI melalui kerja sama trilateral antara Indonesia – Malaysia – Filipina dengan menghasilkan patroli bersama yang efektif mencegah dan mengurangi aktivitas kegiatan penculikan dan pembebasan sandera yang dilakukan *Abu Sayyaf Group*.

Kata kunci: *Diplomasi Indonesia, Diplomasi Bilateral, Diplomasi Multilateral, Abu Sayyaf Group*

ABSTRACT

This study aimed to address the diplomacy the Indonesian Government has conducted in liberating Indonesian Citizens becoming Abu Sayyaf Group's hostages in 2016. Terror action committed by Abu Sayyaf Group by means of kidnapping, taking hostage, and killing civilians, tourists, and ship attendant aimed to get ransom to fund armament and terror activity and to establish ISIS caliphate in South East Asia. The author used bilateral and multilateral diplomacy as a theory. The research method employed in this study was qualitative research method by collecting primary and secondary data. This research was based on interview process and documentation through descriptive elaboration. From the result of research on diplomacy undertaken by Indonesian Government in the attempt of

liberating Indonesian citizens becoming Abu Sayyaf Group's hostages, the author found the effective implementation of bilateral diplomacy by involving Indonesian-Philippine governments through RI's Embassies in Manila and in Davao engaged in negotiation process implemented in coordinated patrol cooperation (PHILINDO MC) and the opening access to Indonesia-Philippine Muslim Education. Indonesian government through RI's Embassies in Kuala Lumpur and Kota Kinabalu – and Malaysia resulted approach to Philippine community leaders in Sabah, by providing access and information. Diplomacy was undertaken by Foreign Ministry and many Ministry levels and multilateral diplomacy. Indonesian Government could liberate Indonesian Citizen through trilateral cooperation between Indonesia-Malaysia-Philippine. An effective joint patrol prevented and mitigated the kidnapping activity and liberated the hostages of Abu Sayyaf Group.

Key words: Indonesian Diplomacy, Bilateral Diplomacy, Multilateral Diplomacy, Abu Sayyaf Group

PENDAHULUAN

Abu Sayyaf Group (ASG) merupakan kelompok pecahan dari *Moro National Liberation Front (MNLF)* dan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)* yang melakukan aksi penculikan, pengeboman, pemerasan terhadap warga sipil, turis asing, pelaut (ABK) dan nelayan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kapal boat di perairan wilayah Pulau Basilan, Mindanao, Jolo, Tawi-Tawi dan pantai timur Sabah, Malaysia seperti di kawasan perairan Lahad Datu dan daerah perbatasan dengan Filipina di perairan laut Sulu. Setelah itu, ASG secara resmi dan bertransformasi menjadi satu kelompok teroris, yang kini berafiliasi dengan *Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS)*.

Aksi penculikan kembali dilakukan setelah sepuluh (10) tahun berlangsung dengan melakukan penyanderaan terhadap WNI yang melintas di kawasan perbatasan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Beberapa Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia dan Malaysia serta wisatawan Korea Selatan, Kanada dan lain-lain disandera oleh kelompok tersebut. Kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 dibajak oleh *Abu Sayyaf Group* di disekitar Perairan Filipina dan menyandera semua Anak Buah Kapal (ABK) pada Maret 2016 yang meminta uang tebusan 50 juta Peso setara Rp 15 Milyar dengan batas waktu yang ditentukan. Dalam melakukan aksinya, ASG tidak segan – segan untuk mengeksekusi sadera apabila sandera dari negara yang bersangkutan tidak memenuhi keinginan pihak ASG, yaitu membayar uang tebusan yang di tawarkan pihak ASG. Warga negara Malaysia, Kanada, Jerman dan lain – lain menjadi korban eksekusi mati oleh ASG dikarenakan pemerintah negara – negara terkait enggan membayar uang tebusan.

Untuk mengatasi masalah-masalah terorisme dan aksi-aksi kriminal di kawasan perairan perbatasan ketiga negara, diplomasi melalui kerja sama kawasan baik bilateral maupun multilateral ditingkatkan pada ketiga negara yang bersangkutan. Dalam mengatasi

permasalahan perlindungan WNI, Kemlu melakukan diplomasi dengan kementerian atau lembaga terkait diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertahanan melalui TNI, POLRI dan BIN (BAIS), Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama. Indonesia mengedepankan seni diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral yang dikedepankan Pemerintah Indonesia dengan melakukan perundingan, pertemuan maupun kerja sama dengan Filipina dan Malaysia.

Untuk memaksimalkan upaya pembebasan sandera, upaya meningkatkan kerjasama multilateral di kawasan dilakukan dengan dikeluarkannya kesepakatan antara Para Menteri Luar Negeri dan Panglima Militer dari negara – negara yang bersangkutan (Indonesia – Malaysia – Filipina) pada Mei 2016. Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dan kerja sama antara lembaga – lembaga yang berkaitan seperti Kementerian Luar Negeri, TNI dan BIN melalui BAIS. Dengan disetujuinya kegiatan patroli bersama di antara Indonesia – Malaysia – Filipina baik patroli melalui darat, laut dan udara dan wilayah – wilayah perairan yang disepakati ketiga negara, tindakan-tindakan dalam menghadapi penyanderaan, dan tukar-menukar informasi. Disepakati adanya pembukaan *hotline* antara *crisis center* Indonesia – Malaysia – Filipina dan menyusun Prosedur Standar Operasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mencoba untuk memahami diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam membebaskan WNI yang disandera oleh *Abu Sayyaf Group*. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana diplomasi Pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan WNI sandera *Abu Sayyaf Group* tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam buku berjudul “Metode Penelitian Hubungan Internasional” yang ditulis oleh Umar Suryadi Bakry (2016:17), Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang lebih bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*understanding*) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Objek utama dalam penelitian ini adalah Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Upaya Pembebasan WNI Sandera *Abu Sayyaf Group*. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai acuannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, metode berbasis dokumen, dan pengumpulan informasi berbasis internet. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan narasumber yakni Guru Militer Pusat Misi Pemeliharaan

Perdamaian dan pernah menjabat sebagai *Minister Counsellor-Konsul* di KJRI Kota Kinabalu, Staff Tim Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri dan staff Pensosbud dari KJRI Kota Kinabalu. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Terorisme *Abu Sayyaf Group* (ASG)

Sebelum insiden 9/11, pemerintah Filipina memberikan label ASG murni sebagai sebuah kelompok bandit sama halnya seperti kelompok-kelompok tulisanes yang merampas harta orang-orang Spanyol di masa kolonial Spanyol. Bahkan, Presiden Gloria Arroyo mendefinisikan ASG sebagai sebuah kelompok kriminal tanpa ideologi apapun. Namun setelah insiden 9/11, ASG dikenal sebagai sebuah kelompok teroris, bahkan Amerika Serikat menyatakan ASG sebagai kelompok yang termasuk ke dalam kelompok teroris internasional dan merupakan kelompok teroris utama di Asia Tenggara yang memiliki keterkaitan dengan dengan Jemaah Islamiyah (JI) dan Al-Qaeda. ASG muncul kembali sebagai sebuah kelompok teroris yang sangat penting diperhitungkan sebagai lawan dari pemerintahan Filipina, AS dan sekutu-sekutunya di Asia Tenggara. Abu Sayyaf Group atau kelompok militan Abu Sayyaf beroperasi di pulau Basilan dan Kepulauan Sulu terkhusus pada wilayah Jolo dan Tawi-Tawi, Semenanjung Zamboanga di wilayah barat Mindanao Filipina Selatan dan perairan Lahad Datu, Kinabatangan, Semporna dan Sandakan, Sabah Malaysia.

Anggota ASG sebagian besar merupakan mantan keanggotaan MNLF dan MILF atau para anggota yang pernah mengikuti kamp militer di Afghanistan. Biasanya dalam Para pemuda berusia sekitar 20 tahun yang memiliki kecenderungan ideologis maupun kriminalitas. ASG memiliki ketertarikan dengan Jemaah Islamiyah (JI), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), Al-Qaeda (AQ) dan *Moro National Liberation Front* dan (MNLF) dalam melakukan pelatihan persersenjataan, perakitan bom dan kerjasama rahasia.

Aksi penculikan dengan tujuan uang tebusan (*Kidnapping For Ransom*) terhadap WNI terjadi pada tahun 2016 sebanyak tujuh kali dengan total 35 WNI yang disandera. Kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 dibajak oleh *Abu Sayyaf Group* di disekitar Perairan Filipina dan menyandera semua Anak Buah Kapal (ABK) pada tanggal 26 Maret 2016 yang menganggut 7000 ton batu bara dan meminta uang tebusan 50 juta Peso atau setara Rp 15 Milyar dengan batas waktu yang ditentukan. Dimana operasi terror dilakukan ASG untuk dapat membeli amunisi persenjataan yang mereka butuhkan untuk bertahan dari

serbuan pasukan perang pemerintah Filipina. Dalam melakukan aksinya, ASG tidak segan – segan untuk mengeksekusi sadera apabila sandera dari negara yang bersangkutan tidak memenuhi keinginan pihak ASG, yaitu membayar uang tebusan yang di tawarkan pihak ASG. Warga negara Malaysia, Kanada, Jerman dan lain – lain menjadi korban eksekusi mati oleh ASG dikarenakan pemerintah negara – negara terkait enggan membayar uang tebusan.

Diplomasi sebagai Langkah Pembebasan WNI Sandera *Abu Sayyaf Group*

Dalam menguoyayakan pembebasan WNI, Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak untuk tunduk kepada keinginan organisasi terosi dengan tidak mnggunakan opsi pembayaran uang tebusan atau “*No-Ransom Policy*”. Pemerintah Indonesia mengedepankan jalur diplomasi dengan melalukan perundingan dengan berbagai lembaga terkait. Kementerian Luar Negeri diplomasi dan koordinasi dilakukan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang diikuti juga oleh Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI dan BIN (BAIS) dengan melakukan patroli di perbatasan, mengadakan rapat dilevel teknis dan pada level menteri rutin setiap dua minggu. Melakukan pendampingan terhadap perusahaan dalam proses negosiasi. Pendampingan juga diberikan kepada pihak keluarga, baik pendampingan psikologis maupun pembaharuan informasi.

Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Maklumat Pelayaran No. 130/IV/DN-16. Berisikan larangan keras bagi syahbandar untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi semua kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke Filipina dan Malaysia. Kemenlu mengadakan perundingan dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan mengundang seluruh media untuk membahas pemberitaan mengenai kasus penyanderaan WNI / WNA yang dilakukan oleh ASG. Menurut pengamatan Kemenlu, Media berperan penting dalam pemberitaaan tersebut dan diminta untuk mengurangi pemberitaan dikarenakan pihak penyandera akan menaikkan uang tebusan 2 – 5 kali lebih banyak dan menyulitkan pemerintah dalam mengupayaan proses pembebasan. Kemenlu melakukan koordinasi dengan KRI Tawau dan KJRI Kota Kinabalu Sabah, Malaysia mengeluarkan himbauan kebada WNI ABK di wilayah Sabah untuk tidak melaut dikawasan rawan, guna menghindari menjadi sasaran penculikan ASG.

Diplomasi Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina

Diplomasi bilateral ini diwujudkan oleh Indonesia dengan Filipina dalam mengupayakan pembebasan WNI sandera *Abu Sayyaf Group*, dengan melakukan hubungan politik, pertemuan – pertemuan kedua negara dan kerjasama bilateral kedua Negara.

Kementerian Luar Negeri dibawah koordinasi Duta Besar Indonesia untuk Filipina melakukan komunikasi dan bernegosiasi secara formal dengan Pemerintah Filipina. Tim dari Kementerian Luar Negeri berupaya menjalin komunikasi formal, melakukan proses tawar-menawar dengan pemerintah Filipina dan meminta Filipina untuk berupaya dengan maksimal dalam membebaskan para sandera.

Pada Juni 2016 diadakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi bernegosiasi kepada Presiden Filipina, menghimbau agar kerjasama dan pertemuan-pertemuan antara Indonesia – Filipina semakin dipererat dan pertukaran informasi sangatlah penting dalam upaya membebaskan sandera *Abu Sayyaf Group*. Kesepakatan kedua negara diwujudkan melalui kerja sama pertahanan keamanan Indonesia yang dikoordinasikan melalui KJRI Davao dan KBRI Manila kepada Kementerian di Filipina dalam *Philippines Indonesia Military Cooperation* (PHILINDO MC). Dalam kerjasama ini terdapat beberapa Sub point dalam memfokuskan kedalam beberapa komite diantaranya, *Joint Intellegence Sub Commite* (JISC), *Joint Operation and Exercise Sub Commite* (JOESC). Dimana dalam kerja sama ini, Indonesia – Filipina membahas dan melaksanakan latihan militer bersama antar kedua negara. Dalam kerja sama ini membahas kegiatan teknis operasional Patroli Terkoordinasi Philindo (Philindo Corpat).

Untuk memaksimalkan kerja sama kedua negara, dibentuk *Turn of Refference* (TOR) yang bertujuan memlakukan pelatihan dan operasi bersama. *Joint Training and Education Sub Commite* (JTESC) memfokuskan kerja sama dibidang pendidikan dan diadakan kursus-kursus dibidang teknis persenjataan yang dimiliki pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina. Dalam kerja sama ini dilakukan pertukaran para Perwira muda sebagai penerus kerja sama kedua negara dalam membentuk dan membangun pendidikan Susiapa dan Seskoad Angkatan Indonesia – Filipina. Dalam kerja sama militer intelejen tersebut TNI dan *Armed Forces of Philippines* (AFP) berdampak pada perluasan dan pertukaran jaringan informasi kedua negara dalam menjangkau keberadaan ASG, sehingga dapat mempermudah dalam upaya mengidentifikasi dan dalam melakukan koordinasi. Kementerian Luar Negeri juga mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Filipina yang terlibat dalam proses pembebasan sadera, dilakukan melalui Pemerintah Provinsi Sulu melalui Panglima *West Mindanao Command* yang disertai pimpinan dari MNLF Faksi Nur Misuari. Hal ini dikarenakan para anggota ASG merupakan ex-combatan MNLF.

Selain melakukan pendekatan kerjasama dibidang keamanan dan pertahanan, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Asia Tenggara dengan Kementerian Luar Negeri

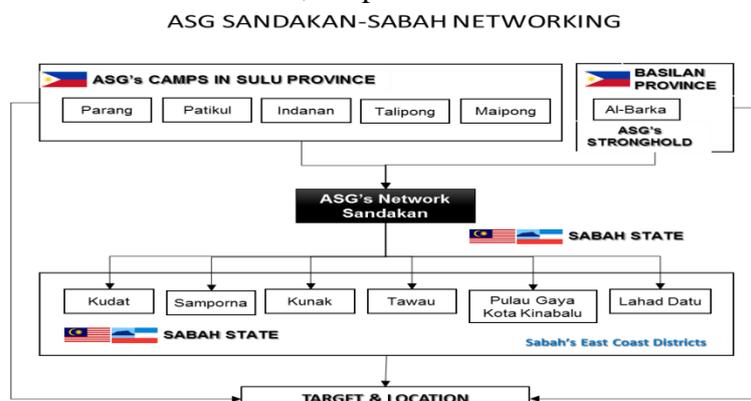
dibidang pendidikan Islam RI – Filipina. Dengan melakukan kunjungan di Al Munawwarah, di Kota Davao Menlu menekankan kerja sama pendidikan dan peningkatan kualitas Islam antara Indonesia dengan Filipina sebagai salah satu elemen penting dalam membendung paham – paham radikal yang berkembang di wilayah Filipina Selatan. Dengan ditandatangani *Letter of Intent* kerja sama yang diwakili oleh Kementerian Agama RI dan Departemen Pendidikan Filipina, disetujui pertukaran ulama, kepala sekolah dan guru madrasah, kerja sama pendidikan vokasi dan pertukaran pelajar serta memberikan beasiswa sebanyak 100 siswa muslim di Filipina untuk belajar di Indonesia per-tahun.

Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Kementerian Agama dan *Centre for Humanitarian Dialogue* (CHD) pada saat menyelenggarakan *Indonesia – Philippines Workshop on Islamic Education Cooperation*. Dan menghasilkan *A Roadmap for enhancing Indonesia – Philippines Cooperation on Islamic Education* yang merekomendasikan kedua negara dengan saran pendirian *Informal Education Advisory Group*. Kerja sama tersebut menghasilkan *A People Compact Immediate Action to Build – to People Cooperation on Islamic Education*.

Diplomasi Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia

Pemerintah Indonesia memaksimalkan pembebasan WNI yang disandera oleh ASG dengan melakukan hubungan bilateral dengan Malaysia, dimana beberapa WNI disandera diculik di daerah perairan Lahad Datu, Kinabatangan, Semporna dan Sandakan, Sabah Malaysia.

Tabel 1. Jaringan Abu Sayyaf Group di Sabah, Malaysia dan Perairan Sulu, Filipina Selatan



Sumber : Guru Militer Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian

perwakilan Indonesia melalui KJRI Kota Kinabalu, Sabah Malaysia melakukan pertemuan dengan Direktur Reskrim Polda Sabah pada September 2016. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai:

- Keselamatan ABK WNI yang disandera oleh ASG di wilayah Pantai Timur Sabah
- Melakukan pendekatan dengan tokoh – tokoh komunitas Filipina di Sabah untuk memantau pergerakan dan jaringan ASG
- Melakukan negosiasi dengan Polda Sabah untuk memberikan kemudahan akses dan informasi terkait penculikan WNI agar bisa memetakan strategi pemerintah Indonesia

Langkah selanjutnya yaitu melakukan komunikasi dengan *Eastern Sabah Security Command* (ESSCOM) / Komandi Keamanan Wilayah Timur Sabah dengan melakukan patroli laut dan menyiagakan helikopter. Pada Juli 2016 di kantor KAPOLDA Sabah dari PDRM Sabah menyatakan bahwa operasi penculikan ASG hampir semuanya berlokasi di Perairan Pantai Timur Sabah-Malaysia. Melalui perwakilan RI yakni KJRI Kota Kinabalu berkoordinasi kepada PDRM Malaysia, upaya pembebasan dilakukan dengan proses negosiasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah RI. Dan melakukan tawar-menawar dengan Ketua Asosiasi Operator Turis Lokal Semporna menyarankan agar ESSCOM menempatkan dua (2) anggota keamanan pada setiap kapal boot, hotel penginapan dan resort di area terkait. Dalam memantau proses pembebasan sandera, Indonesia dan Malaysia melaksanakan pertemuan Bilateral yang dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Ketua Menteri Sabah pada awal tahun 2017 dan Oktober 2017. Dalam pertemuan ini kedua negara membahas permasalahan penculikan WNI yang terjadi di perairan Sabah, Malaysia

Diplomasi Multilateral Indonesia melalui ASEAN dalam Upaya Pembebasan (WNI) Sandera Abu Sayyaf Group

Pemerintah Indonesia menyadari untuk dapat membebaskan WNI sandera ASG diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti Filipina, Malaysia dan bahkan ASEAN dimana salah satu pilar ASEAN merupakan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*). Pada level ASEAN, diadakan *Forum ASEAN Foreign Minister's Meeting* (AMM) ke-49 di Laos pada 23-26 Juli 2016, telah membahas isu keamanan laut di kawasan Asia Tenggara. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas menginisiasi “*Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region*”. Dalam Pertemuan Tingkat Menlu di kawasan ASEAN

ke-49, 24-25 Juli 2016. Walaupun demikian, kerja sama yang berlangsung belum berjalan sesuai dengan harapan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini dinilai kurang efektif dikarenakan masih terjadinya kasus penculikan bahkan pembunuhan dengan cara pemenggalan sandera.

Kerjasama Trilateral Antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam Upaya Pembebasan WNI Sandera *Abu Sayyaf Group*

Hal ini diwujudkan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina dengan melakukan kerjasama Trilateral yang bertujuan untuk membebaskan sandera yang dilakukan ASG dan mencegah terjadinya kasus serupa di perbatasan maritim ketiga negara. Kerja sama Trilateral yang dilakukan ketiga negara dalam mengupayakan pembebasan diantaranya:

1. Inisiasi Pertemuan Trilateral RI – Malaysia – Filipina di Kota Yogyakarta pada 5 Mei 2016 yang menghasilkan *Joint Statment Declaration* yang berisi empat (4) kesepakatan tentang upaya pengamanan kawasan perairan di perbatasan tiga negara, diantaranya:
 - Patroli laut bersama ketiga negara dalam rangka menjaga keamanan di perbatasan tiga negara dan menjaga kestabilan kawasan perairan di tiga negara;
 - *Sharing Informatiion and Intelligence* dengan membentuk *National Focal Point* sebagai fasilitas yang dibentuk oleh ketiga negara yang bersangkutan;
 - Koordinasi antara ketiga negara dalam pemberian bantuan cepat dalam keadaan darurat, khususnya bagi kapal-kapal di perairan perbatasan ketiga negara;
 - Pembentukan *Hotline Communication* antar ketiga negara untuk mempermudah dan mempercepat respon apabila terjadi keadaan darurat.

Gambar 1. Area Patroli Koordinasi Trilateral antara Indonesia – Malaysia – Filipina di daerah perbatasan (sumber : bbc.com)



2. Pertemuan Trilateral RI - Malaysia – Filipina di Manila pada 22 Juni 2017. Dalam pertemuan ini membahas mengenai Kontra Terorisme, berisikan:

- Meningkatkan usaha dan kerja sama dalam menangani akar permasalahan dan kondisi ekstrimisme, namun tidak terbatas pada kemiskinan, narkoba, kejahatan dan ketidakadilan sosial;
- Mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi terutama di wilayah yang berdampingan di ketiga negara;
- Meningkatkan kecerdasan dan berbagi informasi diantara semua badan keamanan dan intelijen mengenai potensi ancaman yang akan segera terjadi dan nyata;
- Menghentikan arus pendanaan kelompok terorisme;
- Mencegah penyebaran terorisme dan konten berhubungan dengan konten terorisme di dunia maya (pemblokiran situs), khususnya di media sosial;
- Mencegah dan menekan eksploitasi teroris terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan penyebaran pesan teroris;
- Mencegah dan menghentikan arus penyelundupan senjata terlarang serta pergerakan semua teroris;
- Pertimbangkan penyediaan pelatihan militer dan penegakan hukum khusus;
- Mendukung Kesepakatan Kerja Sama Trilateral dan upaya subregional lainnya untuk memerangi kejahatan transnasional;
- Meninjau dan melaksanakan semua kesepakatan yang ada mengenai terorisme dan ekstremisme kekerasan;
- Membuat perbandingan analisis silang undang-undang tiap negara tentang terorisme dengan maksud untuk meningkatkan undang-undang;
- Melawan wacana ekstremisme melalui pendidikan, keterlibatan masyarakat termasuk keterlibatan pemimpin agama dan promosi toleransi, moderasi dan kesatuan dalam keragaman;
- Mengeksplorasi inisiatif untuk memberikan dukungan bagi korban terorisme;
- Mempromosikan program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi sebagai bagian dari langkah komprehensif dalam melawan terorisme;
- Melindungi kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak dan kaum muda, dari pengaruh terorisme.

3. Diadakan pertemuan ketiga negara yang membahas mengenai *Trilateral Air Patrol (TAP) Operational Among Three Countries (Indonesia – Malaysia - Philippines)* yang membahas diantaranya :

- Ketiga negara harus menyediakan pesawat yang disesuaikan untuk melakukan patroli udara di kawasan maritim / *Area of Maritime Interest (AMI)* untuk meningkatkan kesadaran situasi maritim dan memberikan informasi untuk mengembangkan gambaran operasi.
- Mengatur tingkat ketinggian penerbangan untuk mengoptimalkan pengawasan dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas udara yang sudah ditetapkan. Peraturan operasi penerbangan antara 200ft - 5000ft. *The Minimum Operating Altitude (MOA)* dan *Critical Point of Approach (CPA)* akan mengikuti prosedur standar operasional / *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- Pusat komando negara tujuan utama / *Maritime Command Center (MCC)* harus mengirimkan jadwal penerbangan dan meminta izin penerbangan Diplomatik / *Diplomatic Flight Clearance (DFC)* setidaknya tiga minggu sebelum berada di MCC.
- Pembentukan maupun pelaksanaan MCC harus mematuhi aturan seperti mengkoordinasikan jadwal penerbangan, menjadwalkan anggota Tim Patroli Gabungan / *Combined Mission Patrol Team (CMPT)* dan memberikan pertukaran informasi seputar MCC dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum yang sesuai kebutuhan seperti yang utarakan oleh *Maritime Patrol Aircraft (MPA)/CMPT*.
- Titik Pandu Patroli Udara dipetakan patroli Indonesia berada di Tarakan, Malaysia berada di Tawau dan Filipina berada di Bongao.
- Protokol berkomunikasi pada isi patroli udara melalui frekuensi tertentu yang sudah disepakati dan semua tim MCC harus menggunakan tanda panggilan tertentu dan bahasa tertentu.

Keberhasilan diplomasi pemerintah Indonesia dalam membebaskan WNI / ABK sandera *Abu Sayyaf Group* dilakukan secara koperhensif dimana sebagian besar operasi dilakukan dengan melibatkan Intelijen. Sehingga ada beberapa materi yang tidak bisa disampaikan kepada publik, serta dilakukan melalui diplomasi secara totalitas. Salah satu upaya yang berhasil dilakukan dalam mengupayakan kebebasan WNI sandera *Abu Sayyaf*

Group melalui diplomasi bilateral maupun multilateral yang dilakukan Pemerintah Indonesia menghasilkan dampak nyata pada kebebasan dua puluh lima (25) WNI dari 32 WNI yang disandera oleh ASG, dimana 4 WNI diantaranya berhasil melarikan diri dan 3 WNI masih disandera.

PENUTUP

Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam membebaskan WNI / ABK sandera *Abu Sayyaf Group* merupakan keberhasilan dari berbagai pihak baik formal dan informal dari berbagai Kementerian beserta lembaga terkait, pihak Pemerintah Malaysia dan Filipina. Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang diikuti juga oleh Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI dan BIN (BAIS), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Diplomasi bilateral Indonesia – Filipina melalui KBRI Manila dan KJRI Davao terlibat dalam proses negosiasi yang diimplementasikan dalam kerjasama Patroli terkoordinasi *Philippines Indonesia Military Cooperation (PHILINDO MC)*. Serta dibukanya askes pendidikan Muslim Indonesia – Filipina. Yang menghasilkan menghasilkan *A People Compact Immediate Action to Build – to People Cooperation on Islamic Education*.

Diplomasi bilateral Indonesia – Malaysia dilakukan melalui Direktur Reskrim Polda Sabah, *Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)* dan PDRM Malaysia melakukan riset di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Kota Kinabalu. Dengan melakukan pertemuan dengan Direktur Reskrim Polda Sabah dan Kabareskrim dan PDRM Sabah. Yang menghasilkan pendekatan dengan tokoh – tokoh komunitas Filipina di Sabah, Melakukan negosiasi dengan Polda Sabah dengan memberikan kemudahan akses dan informasi tentang aktivitas ASG.

Diplomasi multilateral diimplementasikan melalui Kerjasama Trilateral pertama antara Indonesia – Malaysia – Filipina yang menghasilkan *Joint Statment Declaration* dengan menghasilkan *sharing information and intelligence* dan pembentukan *hotline communication*. Kerjasama Trilateral kedua menghasilkan Kontra Terorisme dan Kerjasama Trilateral ketiga menghasilkan *Trilateral Air Patrol (TAP) Operational Among Three Countries (Indonesia – Malaysia - Philippines)*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abuza, Zachary. 2005. *Balik-Terrorism: The Return of The Abu Sayyaf*

Atkinson, Garrett. 2012. *Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman, A Review of The Rise Of Islamic Insurgency in The Southern Philippines*

Bakry, Suryadi, Umar. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Media Massa

Info Singkat Hubungan Internasional -VIII-10-II-P3DI-Mei-2016-4 Keberhasilan Diplomasi Total Terhadap Abu Sayyaf

Info Singkat Hubungan Internasional -VIII-7-I-P3DI-April-2016-16 Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf

Info Singkat-VIII-19-I-P3DI-Oktober-2016-1 Pembajakan Kapal Dan Penculikan WNI

Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017

Jurnal dan Skripsi

Djelantik, Sukawarsini, Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan, *Global & Strategis*, Th. 10, No.2

FIDH, *Terrorism and Human Rights in the Philippines Fighting Terror or Terrorizing*, April 2008 - N°493/ Section 2

Istikharoh, Annis, Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Sandera di Luar Negeri Studi Kasus: Diplomasi Total dalam Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf pada Maret-April 2016, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017, hal. 1-8.

Misya, M. Herry, Efektivitas *Joint Press Statement* Dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina, *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Perwira, Herky, Perubahan Pola Karakteristik Operasi Kelompok Abu Sayyaf di Filipina pada tahun 1991-2012. *Jurnal*, 2014

Wibisono, Nuansa, Adhe, Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016

Website

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160329133044-106-120240/kronologi-penculikan-10-abk-indonesia-oleh-abu-sayyaf/>, diakses pada April 2016

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/754853-begini-keseharian-kelompok-abu-sayyaf-di-filipina> diakses tanggal 19 April 2016

http://www.bbc.com/indonesia/berita/indonesia/2016/03/160330_indonesia_tebusan_abusayyaf, diakses pada 7 Juni 2016

<http://www.cnnindonesia.com:nasional/tni-kirim-dua-kapal-perang-ke-perbatasan-flipina> , diakses pada 12 Juni 2016

<http://www.mindanews.com/mindaviews/2017/05/commentary-addressing-challenges-posed-by-the-abu-sayyaf-group-7-collusion-with-the-abu-sayyaf/>, diakses tanggal 13 Juli 2017

<http://www.unpad.ac.id/2016/07/sandera-abu-sayyaf-bukan-hanya-persoalan-indonesia-dan-filipina-tetapi-juga-masalah-asean/>, diakses tanggal 13 Juli 2017

<http://www.viva.co.id/bea-cukai/read/803546-bebaskan-sandera-abu-sayyaf--pemerintah-pilih-diplomasi> diakses tanggal 13 Juli 2017

<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-filipina-kedepankan-proses-dialog-untuk-bebaskan-10-wni-dari-aby-sayyaf/3274277.html>, diakses tanggal 9 Agustus 2017

<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dianjurkan-libatkan-tokoh-wni-di-filipina-/3262499.html> diakses tanggal 9 Agustus 2017

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160410_indonesia-kisah-pembebasan-sandera2005 diakses tanggal 12 Agustus 2017

<http://www.fidh.org/IMG/pdf/counterterrorism429a.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2017